

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah isu baru yang memerlukan bantuan seluruh dunia setelah berakhirnya perang dingin, di mana beberapa negara di dunia saling bekerjasama dalam hal memberantas terorisme baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional sekalipun. Terorisme menjadi isu yang paling disorot dalam hubungan internasional dan dianggap mengancam keamanan dunia setelah aksi pengeboman markas militer Amerika Serikat Pentagon dan gedung World Trade Center yang antara lain dilakukan oleh kelompok radikal Al-Qaeda pada 11 September 2001. Tragedi penyerangan tersebut menyebabkan negara-negara di belahan dunia turut prihatin dan menyatakan waspada terhadap terorisme.

Peristiwa serangan teroris di WTC pada 11 September 2001 di era kepemimpinan George W. Bush tersebut menjadi puncak dalam perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. Serangan teroris pada saat itu menjadi suatu fakta bahwa munculnya ancaman baru terhadap Amerika Serikat. Adanya perubahan pandangan Amerika Serikat terkait dengan ancaman keamanan nasional Amerika Serikat. Hancurnya WTC ini pula dianggap sebagai saat penentu atas perang melawan terorisme dalam skala global. Banyaknya protes yang diutarakan oleh para keluarga korban WTC serta kerugian yang diterima pemerintahan Amerika Serikat kemudian memunculkan reaksi presiden Bush yang mengeluarkan beberapa kebijakan yang dilatarbelakangi oleh kasus terorisme. Bush membuat suatu perangkat kebijakan luar negeri Amerika Serikat berupa *War on Terror* yang secara resmi dideklarasikan pada 20 September 2001 ditujukan guna memberantas tumbuhnya aktivitas teroris internasional. Memerangi teroris menjadi skala prioritas utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bush cenderung

melibatkan pemanfaatan kekuatan militer dan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakannya tersebut, Bush menggunakan *hard power* dalam menanggulangi terorisme yang mengancam negaranya (Astuti, 2016).

War on Terror menjadi agenda utama selama dua periode kebijakan luar negeri presiden Bush (2001-2008) sampai Obama (2009-2016) yaitu sejak tahun 2001-2016. Sedangkan cara yang digunakan oleh Obama dalam mengambil langkah kebijakan luar negerinya lebih menekankan pada pendekatan-pendekatan cara damai dalam memberantas terorisme namun masih terlibatnya militer, atau yang lebih dikenal dengan *smart power* yaitu perpaduan antara *hard power* dengan *soft power*. Obama juga memanfaatkan koalisi internasional, Obama mencoba memperbaiki kembali hubungan dengan negara-negara yang terlibat teror, seperti Afghanistan. Bahkan kepada negara Irak, Obama pula memperbaiki hubungan dengan jalan membuka jalur perundingan, *agenda setting* untuk memecahkan masalah yang melanda kedua negara tersebut.

Kebijakan George W. Bush yang kerap dinyatakan diskriminatif terhadap dunia islam tercermin dalam hal pengurusan visa, seperti misal saat mengeluarkan regulasi pemberian visa melalui syarat-syarat yang khusus untuk negara-negara tertentu, terutama dari negara muslim atau berkependudukan mayoritas muslim yakni harus menunggu selama 20 hari untuk mendapatkan visa, terlebih untuk laki-laki muslim yang berusia 18 hingga 40 tahun. Nyatanya waktu normal dalam mengurus visa Amerika Serikat hanya memakan waktu selama 14 hari. Kebijakan Bush tersebut merupakan kebijakan yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat, sementara kebijakan Bush yang dinilai diskriminatif ditujukan ke luar negeri antara lain mengenai kebijakan yang berkaitan dengan konflik Israel dengan Palestina.

Program Pelepasan Visa (Visa Waiver Programme), yang memungkinkan orang asing dari negara-negara tertentu untuk memasuki Amerika Serikat tanpa visa kurang dari 90

hari, telah berkembang dari program percontohan yang membantu industri pariwisata dan memperkuat hubungan diplomatik dengan salah satu program terpenting yang mempengaruhi Keamanan Amerika Serikat dan ekonomi Amerika Serikat. program ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama setelah terjadinya serangan 11 September 2001, ketika kebijakan imigrasi Amerika Serikat mulai mengambil pendekatan yang lebih keras untuk mengatasi kesenjangan yang dirasakan dalam keamanan di negara asal Amerika Serikat. Negara-negara VWP berjuang untuk memenuhi persyaratan yang memicu negosiasi cukup besar antara Kongres dan Cabang Eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden George W. Bush yang kemudian memperpanjang VWP. Pada akhir tahun 2006, Pemerintahan Bush mengusulkan agar VWP diubah untuk meminta otorisasi perjalanan online dan memberikan fleksibilitas untuk masuk ke negara-negara yang bekerja sama dalam Perang Melawan Teror.

Pada tahun 2012, Presiden Obama mengeluarkan Perintah Eksklusif yang mengarahkan pengembangan rencana antar-negara untuk meningkatkan perjalanan ke Amerika Serikat, yang secara khusus mengarahkan pemerintahan dibawah pimpinan Barack Obama untuk melihat apakah dapat menambahkan lebih banyak negara ke VWP. Sebelumnya, Presiden telah menyetujui undang-undang, Program Pelepasan Keamanan dan Reformasi Visa Waiver, yang diperkenalkan oleh Senator Barbara Mikulski dan Mark Kirk dan Reprs Mike Quigley dan Steve Chabot yang akan mengubah kriteria di mana negara-negara bisa dipertimbangkan untuk VWP. Namun cara yang dilakukan oleh Obama kali ini berbeda dengan cara yang ditempuh oleh Presiden sebelumnya yaitu Bush, karena lebih mengedepankan *smart power* yaitu perpaduan antara *hard power* dengan *soft power*. Dan lebih mengupayakan proses diplomasi dalam menangani suatu permasalahan antar negara.

Demikian halnya yang terjadi di Amerika Serikat, dalam mencapai tujuan bersama melalui kerjasama internasional, negara Amerika Serikat tergolong pada negara besar bahkan mempunyai sebutan khas sebagai ‘negara adidaya’, oleh karena itu Amerika Serikat memiliki kebijakan yang jika dikeluarkan sudah pasti akan sangat berpengaruh dan bernilai besar dalam kancah politik internasional. Donald Trump yang baru saja memenangkan pemilihan umum pada akhir 2016 dan secara sah terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Tidak semua pihak menyambut dengan baik terpilihnya Presiden Amerika Serikat oleh Donald Trump tersebut, bahkan adanya penolakan yang muncul dari dalam negeri sendiri. Hal tersebut disebabkan karena Trump dinilai sebagai pribadi yang memiliki watak yang kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, seperti halnya tiba-tiba mengejutkan dunia internasional dengan keputusan kebijakan yang ia buat seperti mendeportasi imigran, membangun tembok perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko, mencegah kaum Muslim masuk ke Amerika Serikat, dan bahkan mengancam bahwa Amerika Serikat akan meninggalkan sekutu-sekutunya (Muhammad, 2016).

Pergantian kepala pemerintah di Amerika Serikat dari Barack Obama kepada Donald Trump pada awal tahun 2017 lalu dan yang belum genap menjabat sebagai kepala pemerintah di Amerika Serikat dalam kurun waktu satu bulan ini telah mampu menggegerkan media dunia. Trump dibanjiri banyak kecaman terutama dari masyarakat dunia muslim, Presiden Amerika Serikat yang terhitung baru menjabat ini bersikeras mempertahankan kebijakannya untuk melarang warga dari tujuh negara mayoritas muslim masuk ke wilayah AS. Ia menuding imigrasi, baik yang berasal dari sebagian Amerika Latin, Afrika dan Timur Tengah, sebagai akar permasalahan yang menggerogoti warga Amerika dan menyentuh ketakutan akan terorisme yang menyebar di dalam dan luar negeri.

Trump menyebutkan dalam pidatonya bahwa kebijakan yang ia buat ini bukanlah suatu kebijakan yang dilatar belakangi oleh agama, namun menyangkut perihal teror dan merupakan upaya untuk menjaga negara agar tetap aman dan damai. Pada hari Jumat, 27 Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang isinya merupakan tindak menghentikan sementara masuknya para pengungsi selama 120 hari, sedangkan untuk pengungsi Suriah batas waktu penangguhannya belum ditentukan. Perintah eksekutif Trump tersebut juga melarang masuknya warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya muslim, yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, dalam waktu selama 90 hari ke depan. Pembatasan ini merupakan bagian dari proses pengontrolan imigrasi yang juga termasuk penundaan penerimaan pengungsi. Ternyata pembatasan yang diberlakukan selama pemerintahan Barack Obama lalu menjadi dasar daftar negara yang dilarang Trump. Beberapa negara tersebut sudah tergolong dalam kategori “negara-negara yang diwaspadai” setelah disahkan undang-undang oleh Kongres yang didominasi anggota dari Partai Republik pada tahun 2015 mengubah program penerimaan visa (Goodman, 2017).

Perintah eksekutif berupa pelarangan masuk warga negara asal tujuh negara tersebut mulai diberlakukan pada 29 Juni 2017 pukul 20.00 waktu Washington. Berbagai alasan mengenai keamanan dan menegaskan bahwa larangan tersebut dikeluarkan dengan merujuk beberapa kasus teror yang kerap terjadi akhir-akhir ini seperti halnya aksi serangan teroris di Paris, London, Brussels, dan Berlin. Tidak sedikit yang mengkritik bahwa kebijakan yang dibuat tersebut sebagai cerminan terhadap anti-Islam karena yang termasuk dalam daftar adalah tujuh negara mayoritas muslim di dunia.

Dalam keputusannya, Donald Trump mengutip pada tragedi 11 September 2001 sebagai pembenaran atas kebijakannya. Namun nyatanya, Trump tidak menargetkan beberapa dari negara asal para pelaku serangan 9/11, yakni

Mesir, Libanon, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam daftar larangannya tersebut. Sedangkan sebanyak 15 dari 19 pelaku penyerangan World Trade Center di New York peristiwa 11 September 2001 lalu dari Arab Saudi, yang mana Arab Saudi pula merupakan negara asal pemimpin kelompok islam radikal Al-Qaeda bernama Osama bin Laden. Osama bin Laden disebut sebagai penanggungjawab atas peristiwa tersebut. Namun mengapa disini Arab Saudi tidak termasuk dalam daftar larangan seperti yang ditujukan kepada tujuh negara mayoritas penduduk muslim dunia lainnya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan yang penulis ambil guna mendapat jawaban yang jelas dan akurat yakni : **Mengapa Donald Trump tidak memberlakukan larangan visa kepada warga negara Arab Saudi?**

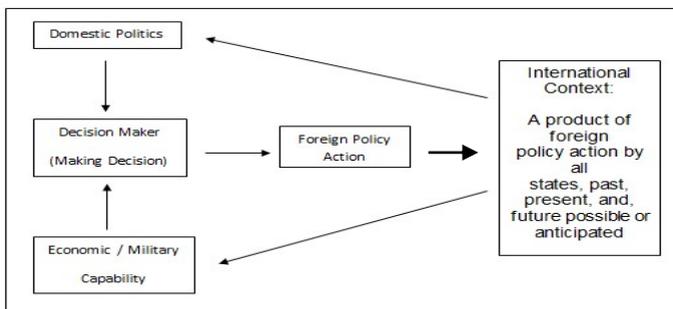
C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang penulis gunakan adalah analitik yang lebih berorientasi pada teori maupun kerangka konseptual. Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dalam penelitian, karena pada bagian ini penulis mencoba untuk menjelaskan peristiwa yang sedang diamati dengan menggunakan beberapa teori maupun konsep yang relevan. Teori yang dipakai penulis disini antara lain yaitu :

Teori Pembuatan Kebijakan (*Decision Making Theory*) dari William D. Coplin

Kebijakan luar negeri suatu negara pada dasarnya merupakan hasil dari beberapa rangkaian keputusan yang saling berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang sedang berkembang dengan negara lain. Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan kebijakan yang

diambil Donald Trump terhadap pembebasan visa Arab Saudi, penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul “Introduction of International Politic”. Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya. William D. Coplin mendeskripsikan teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil (Marbun, 2003).



Gambar 1.1 Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin

Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari beberapa pertimbangan tertentu. “... Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri.” Coplin menjelaskan tentang tiga konsiderasi :

1. Pertama, kondisi politik dalam negeri suatu negara tersebut termasuk pada faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya.
2. Kedua, situasi ekonomi dan militer suatu negara tersebut termasuk pada faktor geografis yang selalu

menjadi pertimbangan utama dalam hal pertahanan dan keamanan.

3. Ketiga, konteks internasional, situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam pengambilan keputusan terdapat aktor-aktor kepentingan yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri yang disebut dengan '*policy influencers*'. Menurut William D. Coplin juga menjelaskan bahwa *policy influencer system* merupakan aktor politik domestic dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers* terjadi secara timbal balik. Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain pula, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutannya diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Akan tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bias mengabaikan tuntutan tersebut.

Dilihat dari pengertian teori pembuatan kebijakan oleh William D. Coplin. Analisis kebijakan luar negeri adalah studi manajemen hubungan eksternal dan beberapa aktivitas antar negara-bangsa. Kebijakan luar negeri ini terdiri dari adanya beberapa tujuan serta tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan pemerintah mengenai urusan-urusan eksternal, terutama hubungan dengan negara-negara asing. Manajemen hubungan luar negeri mengharuskan agar dapat memperhitungkan dengan hati-hati bagaimana suatu rencana tindakan yang akan diambil untuk kepentingan dan urusan luar negeri yaitu cita-cita pemerintah (Sorensen, 2013).

Diberitakan sebelumnya bahwa setelah dilantik pada 20 Januari 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani 10 perintah eksekutif (*executive order*). Dikutip dari SBS pada Kamis (26/1/2017), laporan CNN pada Rabu lalu menyebutkan bahwa ia masih akan mengumumkan beberapa *executive order* lain yang berkaitan dengan visa dan pengungsi (Shoichet, 2017). Menurut laporan tersebut, Presiden Trump memutuskan sesuai janji sewaktu kampanye terkait pelarangan visa kepada warga tujuh negara, yaitu Irak, Iran, Suriah, Libya, Somalia, Yaman, dan Sudan. Menurut draft keputusan, Amerika Serikat akan berhenti memproses visa selama 30 hari bagi negara-negara yang oleh pemerintahan Barack Obama dipandang terlalu beresiko untuk program bebas visa Amerika Serikat. *Reuters* melaporkan bahwa Presiden Trump diduga akan memerintahkan pelarangan penerimaan pengungsi ke Amerika Serikat selama beberapa bulan, kecuali bagi mereka yang melarikan diri dari penyesahan (*persecution*) agama minoritas. Menurut dokumen draft tersebut pula, pemerintahan Trump memberlakukan larangan 120 hari kepada para pengungsi sampai pihak berwenang menerapkan program pengungsi yang lebih selektif. Rencana tersebut sejalan dengan rencana yang digagas dalam kampanye Presiden Trump untuk “proteksionisme” (Deny, 2017).

Pengumuman larangan perjalanan sementara itu dicetuskan Donald Trump pertama kali pada Januari 2017 silam, ia menyebutkan bahwa larangan tersebut merupakan salah satu langkah dalam memerangi terorisme, serta memberi waktu untuk melakukan pemeriksaan keamanan yang lebih baik. Perintah itu menimbulkan kekacauan di beberapa bandar udara karena para petugas harus berselisih untuk melaksanakannya. Keputusan presiden tersebut kemudian diblokir oleh pengadilan-pengadilan federal di tengah penentangan berbagai pihak, yang memandang perintah Trump tersebut merupakan tindakan diskriminasi terhadap kaum Muslim serta tidak ada bukti penguat sebagai alasan

mengenai aspek keamanan. Larangan yang sudah diperbaiki dimunculkan pada Maret lalu namun kemudian sempat dibekukan oleh pengadilan (Lane, 2017).

Melihat kondisi politik domestik yang terjadi di Amerika Serikat, bahwa budaya perpolitikan yang pernah ada di Amerika Serikat saat ini didasarkan pada awalnya peristiwa pengalaman kolonialisme dan revolusi yang pernah terjadi dimasa lampau seperti halnya mengenai hak suara dalam menyampaikan pendapat serta mengambil keputusan yang menjadi hak setiap masyarakat di dunia. Terlebih dalam mengambil dan membuat keputusan mengenai kebijakan luar negeri suatu negara, tentunya akan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi negara dalam mengambil kebijakan luar negeri. Seperti halnya faktor sejarah negara, watak pemimpin, kelompok elit dan lain-lain. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri termasuk pada politik dalam negeri. Politik dalam negeri dapat dikatakan merupakan cerminan dari kebijakan luar negeri suatu negara tertentu. Adanya tiga elemen penting yang dapat membentuk suatu kebijakan domestik, antara lain adalah badan eksekutif negara, parlemen, dan kelompok penekan seperti contoh media massa maupun kelompok kepentingan. Dari ketiga elemen tersebut dapat membentuk interaksi yang dampat mempengaruhi kebijakan yang dibuat suatu negara.

Membandingkan dengan situasi politik yang tengah terjadi di Amerika Serikat saat ini yang berkaitan dengan politik, terlebih mengenai hak dalam mengeluarkan suara antara lain adalah pesta demokrasi saat pemilihan umum Presiden yang diselenggarakan pada akhir tahun 2016 lalu, yakni pada 8 November 2016 dengan kandidat Calon Presiden antara lain Donald Trump yang mewakili partai Republik dan Hillary Clinton sebagai perwakilan kandidat terpilih dari partai Demokrat. Sistem partai politik di Amerika Serikat ini merupakan sistem dua partai yang dominan oleh Partai Demokrat yang kategori sebagai sayap kiri dalam politik Amerika dan mendukung prinsip liberalisme dan Partai

Republik menempatkan dalam kategori sayap kanan yang mendukung prinsip konservatisme, dua partai ini selalu mengantongi kemenangan dalam pemilu sejak tahun 1852. Pemilihan umum tersebut merupakan pemilihan presiden yang diselenggarakan ke-58 kalinya dalam pesta demokrasi masyarakat Amerika Serikat. Hasil akhir pemilu presiden tersebut dimenangkan oleh Donald Trump yang kemudian dilantik sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat pada 20 Januari 2017. Pada tanggal 9 November 2016, pukul 15:00 WIB Donald Trump dinyatakan memperoleh 306 suara dari total keseluruhan 538 suara elektoral dan secara otomatis menjadi presiden yang terpilih (The New York Times, 2017).

Awal mula terbentuknya negara Amerika Serikat, dari sektor ekonomi warganya menitikberatkan pada bidang pertanian dan usaha kecil milik swasta, serta pemerintah di negara bagian bahkan meninggalkan beberapa isu kesejahteraan kepada pihak swasta atau inisiatif daerah. Seperti halnya contoh di Britania Raya dan negara dengan industri lainnya. Sekitar sejak tahun 1930 sampai 1970, kebijakan fiskal dicirikan oleh Keynes yang memaparkan suatu masa di mana liberalisme modern Amerika Serikat menjadi dominasi atas kebijakan ekonomi secara virtual yang tidak dapat dilawan. Amerika Serikat merupakan salah satu dari sekian negara terkaya di dunia yang memiliki sumber daya alam berlimpah, infrastruktur yang maju, teknologi yang canggih, dan produktivitas yang tinggi. Peringkat pendapatan perkapita negara ini termasuk yang tertinggi keenam di dunia dan juga produsen minyak bumi terbesar nomer tiga dan produsen gas alam terbesar kedua di dunia. Amerika Serikat pula adalah negara dagang terbesar nomer dua setelah Tiongkok. Negara ini juga merupakan negara pabrikan terbesar, yang mana seperlima hasil dari pabrikan dunia berasal dari Amerika pada tahun 2010. Sedangkan dari sebanyak 500 perusahaan terbesar di dunia, total 132 perusahaan bermarkas di Amerika Serikat (CNN, 2010). Tidak hanya itu saja, Amerika Serikat juga memiliki pasar finansial terbesar dan memiliki pengaruh di dunia, sekitar 60%

cadangan mata uang global diinvestasikan dalam bentuk dollar AS, sementara 24% diinvestasikan dalam bentuk Euro. Pasar tenaga kerja pun menarik banyak imigran dari seluruh belahan di dunia, bahkan berdasar indeks kemudahan berbisnis dan laporan Daya Saing Global menempatkan negara ini sebagai salah satu negara terbaik (Porter, 2008).

Namun pada tahun 2007-2008 Amerika Serikat mengalami kesulitan akibat dari krisis keuangan, hingga pada Februari 2013 tingkat pengangguran mencapai 7,7% atau sama dengan 12 juta orang, bahkan tingkat pengangguran yang juga termasuk kekurangan jumlah pekerjaan mencapai angka 14,3% atau setara dengan 22,2 juta orang. Tingginya angka pengangguran, menurunnya pendapatan rumah tangga, dan pemangkasan anggaran federal, kemerosotan ekonomi yang terjadi di AS masih berusaha untuk bangkit kembali (Schwartz, 2013). Meskipun jumlah hutang AS tercatat sebesar \$50,2 triliun di akhir kuartal I tahun 2010 sama dengan sekitar 3,5 kali PDB. Pertumbuhan ekonomi AS kuartal I tahun 2017 kini dinilai melambat. PDB AS kuartal I 2017 tercatat hanya 0,7% angka yang lebih rendah dibanding periode sebelumnya yakni 1,2%. Beberapa tokoh ekonom mengatakan bahwa lemahnya pertumbuhan PDB AS ini menjadi hantaman keras untuk Presiden AS Donald Trump yang memiliki ambisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke level 4%. Sehingga dalam mencapai target tersebut, Trump mempunyai inisiatif strategi kebijakan seperti pemangkasan pajak korporasi dan individu (Laucereno, 2017).

Kemudian dari konsiderasi Coplin yang ketiga berupa konteks internasional, dimana situasi negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan apa yang sedang dihadapi, yaitu melihat kembali pada tragedi 9/11 sejak 2001 silam, menurut New America Foundation adanya 82% peristiwa terorisme setelah insiden tersebut yang dilakukan oleh warga negara dan penduduk tetap AS. Kemudian melihat dari data dari beberapa kasus terorisme, alhasil warga yang mendapat dakwaan dengan terorisme atau mereka yang tewas dalam insiden

terorisme yang mengatasnamakan jihad adalah warga negara yang berasal dari negara-negara mayoritas islam, maka dari itu kemudian muncullah suatu kebijakan terkait pelarangan perjalanan (visa) ke Amerika Serikat yang ditujukan kepada negara mayoritas penduduk muslim tersebut, namun tidak berlakunya bagi warga negara asal Arab Saudi yang mana merupakan letak negaranya sangat strategis yaitu berada di kawasan Timur Tengah dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah salah satunya adalah minyak. Arab Saudi merupakan negara penghasil dan pengeksport minyak terbesar di dunia (Beta, 2016).

Dari sekian daftar larangan ketujuh negara mayoritas muslim yang antara lain adalah Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Namun disini tidak berlakunya kepada negara mayoritas muslim lain seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Libanon dalam daftar larangan perjalanan masuk ke Amerika Serikat yang di mana negara-negara tersebut merupakan adanya salah satu negara tempat dimana pemimpin kelompok islam radikal Al-Qaeda berasal, yakni Osama bin Laden yang bertempat kelahiran dan kewarganegaraan Arab Saudi. Dari ketujuh negara yang dilarang masuk ke Amerika Serikat tersebut pula tidak ditemukan adanya perusahaan milik Donald Trump yang berada di salah satu negara tersebut. Namun di Arab Saudi terdapat sebanyak delapan perusahaan milik Trump, sedangkan di Uni Emirat Arab terdapat sebanyak 12 perusahaan Trump, dua diantaranya adalah resort golf di Dubai (Setiawan, 2015). Tidak hanya itu beberapa fakta lain yang penulis temukan yaitu adanya kerjasama bilateral yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi berupa menindak lanjut perihal terorisme dan ketertiban dunia bahkan sampai perusahaan minyak Saudi Aramco, kilang minyak terbesar Amerika Serikat yang sekarang sepenuhnya dimiliki oleh Arab Saudi (Koesno, 2017).

D. Hipotesa

Berdasarkan pada rumusan masalah dan landasan teoritik diatas, maka penulis mengambil hipotesa ini sebagai jawaban sementara yang harus diverifikasi pada pembahasan selanjutnya.

Donald Trump membebaskan warga negara Arab Saudi dari daftar larangan visa dikarenakan :

1. Adanya dukungan dari kelompok kepentingan di Amerika Serikat yang setuju pada kebijakan Donald Trump.
2. Posisi strategis Arab Saudi sebagai mitra Amerika Serikat di Timur Tengah dalam upaya memberantas terorisme.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui alasan dibalik proses dari pembuatan kebijakan Amerika Serikat yang diduga melarang 7 negara mayoritas muslim, namun ada pula negara muslim yang bebas dari pelarangan tersebut seperti Arab Saudi, Mesir, Libanon, Turki, Mesir, dan Uni Emirat Arab.
2. Mencari adanya motif yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan tersebut terhadap negara yang bebas dari larangan visa.

F. Metodologi

Metodologi merupakan gambaran dari langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah dari apa yang menjadi obyek penelitian.

Pada kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara metode cari data, pada dasarnya metode cari data ini dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Metode cari data primer merupakan cara mencari data yang

dikumpulkan secara langsung oleh penulis. Dalam hal ini, data primer diperoleh langsung dari obyek yang ditulis. Biasanya bersifat kuantitatif (data numerik), menggunakan kuisioner, wawancara, dan lain sebagainya. Sedangkan metode cari data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian atau dari pihak lain yang terkait dengan obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat penulis peroleh dari studi pustaka berupa buku, referensi, jurnal, dokumen, library research dan sebagainya yang dapat berfungsi sebagai pelengkap data primer. Penulis menggunakan data sekunder dalam melakukan pengamatan ini dikarenakan dalam pembahasan ini tidak memungkinkannya mendapat data langsung dari obyek yang dijadikan pengamatan serta sulitnya mendapat data yang bersifat kuantitatif dan cenderung kualitatif.

Sedangkan metode yang digunakan penulis disini dalam mencari artikel maupun berita yang baru-baru saja terjadi, yaitu pada tanggal 17 Februari 2017 dalam mencari berita yang berkaitan tentang permasalahan yang kemudian penulis angkat menjadi bahan penelitian. Penulis memilih metode analisis berupa deskriptif dikarenakan pada topik pembahasan yang mengacu pada statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan kata lain statistik deskriptif ini berfungsi menerangkan suatu keadaan, gejala, atau persoalan.

Dari sumber data yang telah penulis dapatkan berupa pernyataan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi Donald Trump dalam membuat kebijakan terkait larangan visa terhadap negara-negara mayoritas Muslim namun adanya negara mayoritas Muslim bahkan negara asal pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda yang tidak termasuk dalam daftar larangan. Dalam daftar lengkap konflik

Trump terdapat fakta menarik, Bloomberg mengungkapkan bahwa Trump memiliki kepentingan bisnis atau hubungan dengan Mesir, Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Pada tahun 2015 silam, ia terdaftar dalam delapan perusahaan yang terkait dengan hotel di Arab Saudi dan juga memiliki perusahaan di Mesir. Ada fakta lain yang juga dikemukakan oleh Dr. Smith, dari Pusat Studi University of Sydney Amerika Serikat, seorang dosen senior dalam politik Amerika dan Kebijakan Luar Negeri. “Faktanya tetap Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, dan Turki adalah sekutu yang relatif kaya dari Amerika Serikat. Mereka cenderung untuk mendapatkan kebebasan dari hal-hal seperti ini karena Amerika Serikat tidak ingin menimbulkan masalah penyinggungan,” papar Dr. Smith. Tidak hanya itu saja, namun hubungan antara kedua belah pihak negara Amerika Serikat dengan Arab Saudi ini cukuplah erat, diyakini bahwa kedua negara ini akan menindak lanjut perihal terorisme dan ketertiban dunia (Killalea, 2017).

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan ini, penulis memberikan batasan penelitian pembebasan pada larangan visa terhadap warga negara Arab Saudi pada awal tahun 2017, dipilihnya negara Arab Saudi ini dikarenakan adanya kepentingan yang sangat mencolok dibandingkan dengan beberapa negara lain yang mendapat pembebasan adanya larangan visa masuk ke Amerika Serikat. Adanya kepentingan yang dilakukan Donald Trump terhadap negara muslim lain yang tidak termasuk dalam daftar larangan, lalu adanya fakta yang mengungkapkan bahwa Trump memiliki kepentingan bisnis atau hubungan erat dengan beberapa negara penduduk mayoritas muslim lain seperti Mesir, Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Jangkauan penulisan diluar dari negara Arab Saudi ini pun masih tetap disinggung dan dibahas karena adanya keterkaitan dengan tema yang akan penulis bahas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan kedalam beberapa bab guna untuk mempermudah penyusunan bahasan dan beberapa uraian, dengan perincian sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi, jangkauan penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kebijakan luar negeri yang terjadi pada era kepemimpinan George W. Bush dan Barack Obama. Munculnya kebijakan yang dilatarbelakangi oleh peristiwa yang mengakibatkan perlu adanya kebijakan. Seperti halnya tragedi WTC yang terjadi pada masa kepemimpinan Bush 2001 silam yang membuat pemimpin Amerika Serikat pada saat itu membuat beberapa kebijakan. Khususnya pada kebijakan terkait visa mengunjungi Amerika Serikat.
- BAB III** Berisi penjelasan mengenai kebijakan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Donald Trump kepada tujuh negara mayoritas muslim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan beberapa sebab tidak termasuknya warga negara asal Arab Saudi dari daftar larangan visa. Ditambah isu visa dan non visa.
- BAB IV** Berisi penjelasan beberapa pertimbangan dari tiga konsiderasi Coplin yang melatarbelakangi pembebasan larangan visa terhadap Arab Saudi. Melalui politik domestik dan konteks internasional. Dan adanya pihak-pihak dari dalam

negeri Amerika Serikat yang mendukung kebijakan Donald Trump.

BAB V Pada bab ini berisi kesimpulan, yang merupakan isi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari beberapa bab sebelumnya.